

**PERKEMBANGAN DEMOKRASI JEPANG:  
SEBUAH KOMITMEN DALAM PERUBAHAN**  
*Development of Japan's Democracy: A Commitment in Change*  
**Yulian Adi Kurniawan<sup>1</sup>**  
**NIM. 140910101012**

## **Pendahuluan**

Dalam beberapa dekade ini, perubahan sistem pemerintahan Jepang dari sebuah negara yang otoriter menjadi demokrasi merupakan sebuah sejarah yang besar dalam dunia internasional. Dimana hingga pertengahan abad kesembilanbelas, masyarakat Jepang masih bersifat feodal, menggantungkan diri pada pertanian dan cenderung terpecah – pecah. Pada masa tersebut, *Shogun* merupakan aktor yang memiliki peran penting sebagai penguasa di berbagai wilayah Jepang.

Dalam perkembangannya, sistem feodal Jepang dapat dikatakan stabil dengan melihat minimnya pergolakan yang terjadi di dalam masyarakatnya. Namun kestabilan ini mulai terganggu ketika Amerika Serikat datang ke Jepang dan melakukan *Western Gunboat Diplomacy* pada era 1850an. Dimana proses diplomasi tersebut menghasilkan sebuah perjanjian yang mengharuskan Jepang membuka diri untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut memaksa Jepang untuk memberikan izin kepada kapal – kapal dagang Amerika untuk berlabuh di Shimoda dan Hakodate<sup>2</sup>.

## **Transisi Sistem Feodal Jepang**

Dalam perkembangan kerjasama dagang antara Jepang dan Amerika Serikat, interaksi yang terjadi bukan hanya mengenai interaksi perdagangan antara penjual dengan konsumennya, namun yang menjadi fokus permasalahan lain dari para elit politik Jepang adalah penyebaran nilai – nilai modernisasi. Menurut Kurt Weylan, ketika aktor domestik (masyarakat) menerima norma sosial dan struktur lembaga asing, maka adakalanya muncul ketidakpahaman atau ketidakcocokan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

<sup>2</sup> Miére, C. L. 2014. *Maritime Diplomacy in 21<sup>st</sup> Century: Drivers and Challenges*, New York: Routledge.

nilai untuk diterapkan di lingkungan tersebut. Sehingga secara perlahan, akan muncul penolakan dari masyarakat yang dapat menciptakan kondisi yang buruk<sup>3</sup>. Meskipun pernyataan tersebut lahir berdasarkan penelitian Weyland dalam pengalaman Amerika Latin dalam mengadopsi nilai – nilai demokrasi, namun inti dari penelitian tersebut masih relevan untuk membahas dinamika Jepang dalam mengadopsi demokrasi sebagai nilai yang baru bagi masyarakatnya. Dimana sepanjang awal masa modernisasi yaitu tahun 1868 hingga 1912, nilai – nilai dari sistem feodal secara perlahan – lahan mulai termarjinalkan. Hal tersebut dikarenakan adanya nilai – nilai barat yang muncul secara konstan ditengah – tengah masyarakat.

Pada tahun 1850 hingga 1860 terjadi perbedaan pandangan di masyarakat Jepang mengenai modernisasi, dan para elit politik Jepang berusaha menerapkan modernisasi sebagai alat untuk menghadapi ancaman dari kekuasaan kerajaan. Sehingga muncul berbagai isu mengenai koalisi para pemimpin feodal untuk bekerjasama melawan para *shogun*, yang berpuncak pada sebuah perang sipil pada tahun 1868. Peristiwa tersebut mengakibatkan munculnya Restorasi Meiji, yaitu pengembalian kekuasaan di tangan seorang kaisar<sup>4</sup>. Karena dinilai bahwa Jepang akan lebih damai jika kekuasaan dipegang oleh satu penguasa.

Setelah restorasi Meiji, rezim penguasa yang baru dengan cepat melakukan inisiasi kampanye tentang modernisasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengamankan posisi Jepang sebagai negara makmur di dunia internasional. Sistem oligarki Jepang secara tidak peduli langsung memasukkan peraturan dan norma sosial dari modernisasi yang lebih bersifat liberal. Dimana mereka menganggap bahwa dengan menjadi bagian dari modernisasi barat merupakan kunci kesuksesan bagi Jepang.

Pada penerapannya, masyarakat dirubah menjadi buruh dalam perindustrian Jepang. Semua halangan untuk berinteraksi satu sama lain dihilangkan, status kebangsawanan dihilangkan, dan semua orang sama dihadapan hukum. Pendidikan akademis dan pengembangan literatur juga mulai muncul

---

<sup>3</sup> Weylan, K. Desember 1998. "The Political Fate of Market Reform in Africa and Latin America". *Dalam Jurnal International Studies Quarterly*. Volume 42. No. 4. Hal. 645 – 673.

<sup>4</sup> Kennon, J. "Democracy in Japan: From Meiji to MacArthur". *Dalam Jurnal Lehigh Review*. Volume 20. 2012. Hal. 18.

pada era modernisasi Jepang, sehingga memberikan suatu perbaikan status sosial bagi masyarakat Jepang. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap literatur, menyebabkan semakin meluasnya nilai – nilai barat yang masuk melalui tulisan – tulisan dari para tokoh politik barat.

Didalam perkembangan yang semakin pesat, para elit Jepang kesulitan untuk memisahkan proses industrialisasi dari nilai – nilai liberal. Ini ditandai dengan lahirnya Konstitusi Meiji pada 1889 yang dikenal sebagai “*Gift to The People*”, yang merupakan sebuah respon dari para pemimpin Jepang bagi perkembangan masyarakat pada kala itu. Konstitusi tersebut memenuhi tuntutan kaum buruh supaya memiliki perwakilan dalam pemerintahan dengan membuat sebuah parlemen yang mana masyarakat dapat berpartisipasi langsung serta berfungsi untuk menyerap aspirasi rakyat. Dimana dewan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah dewan yang terdiri dari perwakilan masyarakat yang dipilih dari pemilihan umum, dan yang kedua hampir sama dengan *House of Lord* di Inggris, dimana anggotanya terdiri dari kaum bangsawan di Jepang.

Dari 1889 hingga akhir dari era Meiji pada 1912, Jepang sesuai dengan konsep mengenai “*Hybrid Regime*”. Dimana Jepang merupakan negara yang tidak sepenuhnya otoriter dan tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Karena ketika dilihat dari sistem otoriter, Jepang lebih terbuka dengan nilai – nilai liberal yang masuk melalui modernisasi. Sedangkan jika dilihat dari sistem demokrasi, hanya sedikit masyarakat Jepang yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemerintahan.

## Demokrasi Taisho

Pada tahun 1918 hingga 1931 merupakan era dari Demokrasi Taisho, dimana pada masa tersebut masyarakat dunia melihat Jepang sebagai negara demokrasi yang agresif<sup>5</sup>. Dimana pada era Taisho, Jepang telah melakukan berbagai usaha penjajahan terhadap negara lain. Sikap tersebut disebabkan adanya proses industrialisasi Jepang yang diawali dengan semakin berkembangnya gerakan – gerakan buruh yang menuntut hak dan perubahan kepada pemerintah. Dengan pertumbuhan penduduk semakin pesat, diperlukan banyak sekali sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat mengurangi tuntutan dan menciptakan kestabilan dalam pemerintahan Jepang. Namun perlu kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara dengan luas tanah yang bisa ditanami sangat sedikit, serta tidak memiliki sumber daya alam dan mineral yang memadai. Sehingga kondisi tersebut memaksa Jepang untuk melakukan invasi ke negara tetangga guna memperoleh sumber daya yang penting.

Jepang melakukan invasi ke beberapa negara seperti China tahun 1894 sampai 1895 dan juga Rusia pada tahun 1904 sampai 1905. Perubahan sikap Jepang yang lebih agresif tentu saja diikuti dengan perubahan sistem pemerintahan, dimana muncul sebuah lembaga eksekutif dan sistem birokrasi yang mendukung pertahanan militer guna memperkuat Jepang dalam setiap perang. Sehingga secara tidak langsung sikap ini merubah karakter Jepang menjadi sebuah negara otoriter, karena setiap kebijakan ditentukan oleh badan eksekutif dalam rangka memimpin negara untuk melakukan invasi. Sementara itu, sistem demokrasi suatu negara akan terwujud apabila negara tersebut mampu menciptakan suasana damai dengan negara tetangga<sup>6</sup>.

Dalam sistem birokrasi Jepang terdapat kelompok *Zaibatsu*, sebuah kelompok konglomerat yang mempengaruhi perekonomian Jepang<sup>7</sup>. *Zaibatsu* menggunakan relasinya dengan pemerintah untuk mengamankan kekuasaannya

<sup>5</sup> *The Rise and Fall Taishō Democracy*. Dalam situs <http://www.nippon.com/en/in-depth/a03302/>, diakses pada 07 Desember 2015.

<sup>6</sup> Pietrzyk, D. I. Februari 2003. “Democracy or Civil Society?”. *Dalam Jurnal Politics*. Volume 23. Hal. 38 – 45.

<sup>7</sup> Morikawa & Hidemasa. 1992. *Zaibatsu: The Rise and Fall of Family Enterprise Groups in*.

dalam monopoli, subsidi dan beban pajak. Peran *Zaibatsu* dalam pemerintahan Jepang sangat penting, dimana mereka merupakan penyuplai dana paling besar dalam roda pemerintahan, terutama militer. Para konglomerat tersebut juga tidak setuju dengan adanya demokrasi, karena hal tersebut akan menghambat pengaruh mereka dalam kubu pemerintahan.

### **Demokrasi Pasca Okupasi**

Dengan kekalahannya dalam perang 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika. Pasukan penjajah Amerika yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur secara jelas menginginkan suatu perubahan terhadap sistem pemerintahan Jepang, yaitu melakukan reformasi dan demokratisasi. Menurut MacArthur dengan adanya demokrasi, Jepang menjadi lebih damai dan tidak akan seagresif pada saat Demokrasi Taisho. Proses demokratisasi Jepang dimulai dengan menanamkan pemahaman akan buruknya sistem otoriter pada masa era Taisho.

Langkah pertama yang diambil Amerika adalah membentuk opini publik bahwa perang merupakan tindakan yang sangat merugikan. Tindakan ini bertujuan untuk melakukan demiliterisasi dalam tubuh Jepang. Selain itu para penjajah Amerika juga melakukan pemusnahan besar – besaran terhadap armada perang yang dimiliki oleh Jepang. Langkah selanjutnya adalah perubahan sistem ekonomi dalam pemerintahan Jepang. Melalui gerakan yang disebut “Reformasi Agraria” MacArthur memberikan kesempatan bagi para petani kecil untuk lebih dapat mengelola sendiri hasilnya dan memberikan pencitraan bahwa pemerintahan Jepang sudah demokratis. Kebijakan desentralisasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan sistem perekonomian *Zaibatsu* dari tubuh Jepang. Dan langkah – langkah tersebut diakhiri dengan pembuatan konstitusi Jepang 1947 yang dipelopori oleh MacArthur. Dimana di dalamnya menyebutkan dengan jelas bahwa Jepang merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Kennon, J. “Democracy in Japan: From Meiji to MacArthur”. *Dalam Jurnal Lehigh Review*. Volume 20. 2012. Hal. 23.

Sebagai negara yang demokrasi, saat ini Jepang memiliki struktur ketatanegaraan yang meliputi supra struktur dan infra struktur<sup>9</sup>. Dimana supra struktur adalah lembaga – lembaga kenegaraan atau alat – alat perlengkapan negara yang sesuai dengan Konstitusi 1947, meliputi:

1. Lembaga Legislatif, yaitu *National Diet* (Parlemen Nasional)
2. Lembaga Eksekutif, yaitu *Cabinet* (Dewan Menteri) yang dipilih oleh Perdana Menteri

3. Lembaga Yudisial, yaitu *Supreme Court* (Mahkamah Agung)

Sedangkan infra struktur adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga – lembaga kemasyarakatan, dimana setiap aktifitasnya mempengaruhi lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsinya. Infra struktur terdiri dari 5 (lima) komponen yang meliputi:

1. Partai politik
2. Golongan kepentingan (*interest group*)
  - a. *Interest group* asosiasi
  - b. *Interest group* institusional
  - c. *Interest group* non – asosiasi
  - d. *Interest group* yang anomik
3. Golongan penekan (oposisi)
4. Alat komunikasi politik
5. Tokoh politik

Sebagai suatu negara demokrasi, Jepang tidak dapat meniadakan keberadaan partai politik. Karena partai politik adalah salah satu wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

Di Jepang terdapat banyak sekali kelompok kepentingan dan yang paling menarik adalah kelompok *Keiretsu*. Kelompok *Keiretsu* merupakan transformasi dari nilai – nilai *Zaibatsu* yang diterapkan guna menghadapi liberalism, terutama dalam bidang belakang. Saat ini perusahaan – perusahaan Jepang berhasil bertahan menghadapi gempuran globalisasi berkat adanya kelompok *Keiretsu*. Berbeda dengan *Zaibatsu* yang bersifat monopolistic, *Keiretsu* terdiri dari para pemilik perusahaan, baik yang besar maupun kecil. Dimana didalamnya terdapat sistem saling memasang saham pada setiap perusahaan anggota. Sehingga ketika ada suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan, maka *Keiretsu* akan berusaha untuk menyelamatkannya sehingga tidak bangkrut dan diambil alih negara lain. Sehingga dengan sistem seperti itu, Jepang tidak akan pernah

<sup>9</sup> Anonim. Juni – Agustus 1993. “Mengenai Sistem Politik dan Pemerintahan Jepang”. *Dalam Jurnal Yustisia*. Nomor 22.

kehilangan perusahaan – perusahaan dalam negerinya dan dapat memperoleh pemasukkan yang besar dari perusahaan – perusahaan tersebut. Inilah alasan yang menjadikan Jepang menjadi sebagai salah satu negara maju dengan perekonomian yang stabil.

## **Kesimpulan**

Demokrasi Jepang saat ini bukan semata – mata lahir dari pemikiran para *founding fathers* – nya, namun telah melewati berbagai dinamika yang sangat menakjubkan. Pengalaman demokrasi Jepang menunjukkan bahwa lingkungan eksternal suatu negara sangat mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara. Pada pertengahan abad ke – 19, Jepang mencoba untuk menerapkan modernisasi dalam rangka melawan kekuasaan kerajaan. Namun yang terjadi adalah sebuah perang sipil yang sangat merugikan bagi Jepang. Sehingga muncullah Restorasi Meiji yang memberikan kekuasaan kepada kaisar. Setelah Restorasi Meiji, para pemimpin baru menginisiasikan adanya modernisasi dalam bidang ekonomi, yang kemudian dikenal sebagai Industrialisasi Jepang. Pasca Industrialisasi, perekonomian Jepang benar – benar berkembang pesat, namun juga diikuti dengan semakin kompleksnya tuntutan yang diinginkan rakyat Jepang.

Tuntutan kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan jumlah sumber daya alam yang dimiliki Jepang. Sehingga memaksa Jepang untuk melakukan berbagai upaya penjajahan guna memperoleh sumber daya alam. Tentu saja tindakan tersebut menciptakan citra yang buruk bagi pemerintahan Jepang dalam dunia internasional. Selain itu, sikap Jepang yang lebih agresif membuat pemerintah merubah sistem pemerintahannya menjadi otoriter. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, dimana pada 1945, Jepang kalah dalam perang dan mulai dijajah oleh Amerika. Pada masa – masa inilah para penjajah Amerika melakukan reformasi dan perubahan konstitusi Jepang menjadi negara yang demokratis. Dan tentu saja konstitusi 1947 ini masih digunakan hingga saat ini.

Namun yang menjadi suatu hal yang menarik dalam dinamika perkembangan sistem pemerintahan Jepang adalah komitmen Jepang dalam membatasi pengaruh – pengaruh dari luar baik secara ideologi maupun materiil. Ini dapat dilihat dari munculnya *Zaibatsu* yang benar – benar menutup diri akan

nilai – nilai barat. Meskipun MacArthur melalui konstitusi Jepang telah menerapkan demokrasi dan menganggap bahwa *Zaibatsu* telah gugur, namun pada kenyataannya nilai – nilai *Zaibatsu* masih terus berkembang di dalam jiwa elit Jepang dan tersu bertransformasi mengikuti perkembangan jaman. Hasil dari transformasi *Zaibatsu* adalah *Keiretsu* yang berhasil menjaga perusahaan - perusahaan Jepang dari gempuran ekonomi kapitalis yang keras. Hal inilah yang membuat perekonomian Jepang saat ini relatif stabil.



## Daftar Pustaka

### Buku – buku

Miére, C. L. 2014. *Maritime Diplomacy in 21<sup>st</sup> Century: Drivers and Challenges*, New York: Routledge.

Morikawa & Hidemasa. 1992. *Zaibatsu: The Rise and Fall of Family Enterprise Groups in*.

### Jurnal

Kennon, J. “Democracy in Japan: From Meiji to MacArthur”. *Dalam Jurnal Lehigh Review*. Volume 20. 2012. Hal. 18.

*Ibid.* Hal. 23

Pietrzyk, D. I. Februari 2003. “Democracy or Civil Society ?”. *Dalam Jurnal Politics*. Volume 23. Hal. 38 – 45.

Weylan, K. Desember 1998. “The Political Fate of Market Reform in Africa and Latin America”. *Dalam Jurnal International Studies Quarterly*. Volume 42. No. 4. Hal. 645 – 673.

### Situs Internet

The Rise and Fall Taishō Democracy. Dalam situs <http://www.nippon.com/en/in-depth/a03302/>, diakses pada 07 Desember 2015.